

**PENGARUH KELOMPOKK KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**



*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh

N U R S A M

E 131 06 020

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2010

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN TERHADAP
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

NAMA : NURSAM

NIM : E 131 06 020

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, November 2010

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Adi Survadi Culla, MA.

NIP. 19630217 199202 1 001



Ishaq Rahman, S.IP., M.Si

NIP. 19721028 200501 1 002



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN TERHADAP
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

NAMA : NURSAM

NIM : E 131 06 020

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 15 November 2010.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. Dr. J. Salusu, M.A.

Sekretaris : Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi Culla, M.A.

2. Ishaq Rahman, S.IP., M.Si

3. Burhanuddin, S.IP., M.Si



Handwritten signatures of the evaluation team members, including the Chairman, Secretary, and three members, each followed by a dotted line for a name.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Puji dan Syukur tak terkira penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas Karunia, Rahmat serta HidayahNya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta yang telah membesarkan, merawat, membantu dan tak hentinya memberikan penulis motivasi selama menjalani studi di Universitas Hasanuddin. Untuk Ayahanda Tahiruddin dan Ibunda tercinta Syamsiah serta keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk doanya kepada penulis selama ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak DR. H. Adi Suryadi Culla, M.si dan Bapak Ishaq Rahman, SIP, M.si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Armin Arsyad, M.si Sebagai Pembantu Dekan 1 FISIP UNHAS sekaligus pengajar pada Program Studi Ilmu Politik Fisip.

2. Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Drs. Aspianoor Masrie, serta segenap Dosen-Dosen Jurusan Hubungan Internasional atas pengarahan, ilmu, serta pelajaran berharga yang telah diberikan. Serta tak lupa Dosen se-Fisip Unhas yang telah memberikan banyak pengetahuan berharga kepada penulis selama mengikuti kuliah.
4. Bapak, Ibu staf Akademik dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unhas (Bunda dan Kakak Rahma) yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fisip Unhas.
5. Seluruh keluarga besar penulis terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis dan senantiasa mendoakan satu sama lain dalam Ukhawah.
6. Saudara-saudaraku di HI, *Ambassador '06* terkhusus kepada sahabat-sahabatku Ary, Minha (ucapan terima kasihku tidak cukup untuk saya ungkapkan di sini), Vian (thanks brother), dedi, zaki, Arham (cepatmi proposal),) beserta teman-teman yang telah lebih dari 4 tahun mengisi warna hidup penulis. Kepada Ismi, Febi, Shinta, Daniar, Ika, Dedy, Rahman, Ratih, Atun (Allahu Akbar, kuasai dirimu), Asri, Baim, Jein, Qadry, Arfian, Nia, Three, Emy, Izty, Ashlee, Rizcha, Rista, Riri, Lala, Dewi, Dede, Ambon, Ippank, Ravi, Sofyan, Mba Hapsari, Masrina, Achie, Beby, Nita, Tholib, dan Arafat, terima kasih atas segala bantuan dan juga

kebersamaan yang telah kita bina bersama sejak menginjakkan kaki pertama kali dikampus kita tercinta. Serta

7. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih buat kak Kasim, kak Helmy, kak Accul, kak Jess, kak Adit, kak Dev, kak Acong, kak Anca, kak Dejhon, kak Nita, kak Andika, kak Nurdha, kak Aswin (makasih atas semangatnya pada saat menjelang ujian), kak Mamet, kak Andi, kak Ridho, kak Awal, kak Radhis, kak Sahar, kak Ewing, kak Nino, kak Ani, kak Dian, kak Murni, makasih atas waktu dan semua nasihatnya serta ilmu yang diberikan. Serta buat kawan-kawan 07 (mana nama angkatanmu.....peace!!!!), 08 (jangan patah semangat) 09 (tunjukkan loyalitasmu pada HIMAHI), 10 (selamat datang di HIMAHI dan anggaplah HIMAHI sebagai rumah kedumu...)

serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semoga Allah membalas semua kebaikan kepada Bapak/Ibu/saudara (i). Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2010

NURSAM

ABSTRAKSI

N U R S A M. E 131 060 20. Judul Skripsi : “Pengaruh Kelompok Kepentingan terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia”. Dibawah bimbingan **Dr. H. ADI SURYADI CULLA, M.A,** sebagai Pembimbing I dan **ISHAQ RAHMAN, S.IP, M. Si.** Selaku Pembimbing II

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kelompok Kepentingan khususnya Kelompok Kepentingan Islam terhadap proses pengambilan keputusan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia khususnya di Kawasan Timur Tengah dalam kasus Israel-Palestina

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara objektif gerakan Kelompok Kepentingan khususnya Kelompok Kepentingan Islam dan bagaimana Kelompok Kepentingan Islam mempengaruhi proses pengambilan keputusan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia , dengan data-data yang didapat dari studi kepustakaan. Metode penulisan yang digunakan Penulis adalah metode deduktif yaitu menggambarkan masalah secara umum kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu digambarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepentingan khususnya Kelompok Kepentingan Islam memiliki pengaruh dalam proses Pengambilan kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia khususnya di Kawasan Timur Tengah dalam kasus Israel-Palestina, hal ini dapat dilihat adanya tekanan yang dilakukan oleh kelompok kelompok Kepentingan Islam berupa aksi-aksi demonstrasi, pernyataan-pernyataan lewat media massa dan lobi ke Pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan politik Luar Negeri Indonesia mengenai kasus Israel-Palestina.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Konsep Kelompok Kepentingan.....	17
B. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KELOMPOK KEPENTINGAN DAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA	
A. Kelompok kepentingan Islam di Indoneisa.....	37
1. Muhammadiyah.....	41
2. Nahdlatul Ulama.....	46
3. Majelis Mujahidin Indonesia.....	48
4. Kelompok Kepentingan Islam lainnya.....	49
B. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.....	51
1. Dasar Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.....	52
2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.....	56
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perumusan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.....	59
BAB IV PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA	
A. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam proses kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.....	62
B. Preanan Kelompok Kepentingan dalm implementasi Kebijakan Politik luar Negeri Indonesia.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur dengan diruntuhkannya Tembok Berlin berdampak pada perkembangan hubungan internasional. Hal ini mendorong terjadinya perubahan dalam tatanan dunia internasional. Mulai dari sistem tatanan dunia internasional yang beralih dari Sistem Bipolar ke Sistem Multipolar serta sampai pada pelaku dan perilaku actor hubungan internasional. Perubahan sistem tatanan dunia internasional ditandai dengan banyaknya aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya. Seiring dengan hal tersebut isu-isu yang berkembang dalam dunia internasional juga mengalami perubahan dari *Traditional Issue* (Politik, Keamanan dan Pertahanan) ke *Contemporary Issue* (Ekonomi, Terroris, Ham, Lingkungan, dan Demokrasi).

Hubungan internasional saat ini terfokus pada *Contemporary Issue* yang lebih banyak menekankan pada hubungan Politik Ekonomi yang didasari oleh Proses Globalisasi. Dengan proses globalisasi, interaksi antara aktor hubungan internasional dalam bidang politik ekonomi tidak semata hanya aktor negara dengan negara melainkan bisa juga dengan aktor non-negara seperti *Non-*

Government Organization's (NGO's), Multinational Cooperation (MNC), International Government (IGO). Negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Sebagaimana halnya dengan negara, NGO's, MNC, dan IGO juga memegang peranan penting dalam hubungan internasional.

Fenomena banyaknya aktor yang terlibat yang terlibat dalam hubungan internasional baik aktor negara maupun aktor non-negara menyebabkan ada banyak kepentingan yang harus diperjuangkan. Baik itu berupa kepentingan negara dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya, maupun kepentingan dari aktor-aktor lain seperti NGO's, MNC, dan NGO. Pada akhirnya memunculkan persaingan untuk mencapai kepentingan tersebut. adanya kelompok-kelompok yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompoknya sendiri tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup dunia internasional, tetapi juga terjadi dalam suatu kawasan bahkan dapat juga terjadi dalam suatu negara.

Pada kenyataannya bahwa kelompok kepentingan dalam mencapai kepentingan tidak hanya bergerak pada level politik internasional tetapi juga banyak terlibat dalam kehidupan politik domestik suatu negara. Misalnya, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara dalam hubungan internasional, dalam proses pengambilan kebijakannya terindikasi terlibatnya kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat mulai dari asosiasi dagang, serikat buruh, himpunan pemuka gereja,

perwakilan petani, organisasi hak-hak sipil, dan lain-lain. Seiring berjalanya waktu perkembangan kelompok kepentingan di Amerika Serikat cenderung menguat.

Ada 3 jenis kelompok kepentingan yang pertumbuhannya paling pesat belakangan ini, yakni PAC (*political action Committe*), Kelompok Kepentingan Public (*public Interest Group*), dan Lobi Bisnis (*business lobbies*). PAC adalah salah satu organisasi yang khusus menghimpun dana dari perseorangan atau kelompok yang menjadi anggotanya sebagai dana kampanye bagi kandidat politik tertentu. Salah satu kelompok yang masuk dalam kategori PAC adalah AIPAC yang banyak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan kepentingan kelompok Yahudi di Kawasan Timur Tengah¹.

Di Australia hal serupa juga terjadi dimana kelompok kepentingan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik yang berupa kebijakan-kebijakan public yang dikeluarkan pemerintah. Seperti ACTU (*Australian council of trade union*), yang merupakan gerakan buruh yang berfungsi sebagai akses kepada pemerintah untuk pencapaian kepentingannya, serta kelompok kepentingan yang dikenal dengan nama CAI (*confederation of Australia Industry*). Kelompok kepentingan

¹<http://wavysearch.com/eboock/621-konflik-kepentingan-antara-amerika-dan-kelompok-islam-.html>. di akses pada tanggal 26 mei 2010.

di Australia cenderung mendekati diri kepada partai-partai politik misalnya ACTU dan CAI cenderung searah dengan partai politik, yaitu partai Liberal-Nasional².

Selain itu keberadaan kelompok kepentingan juga terdapat pada Kawasan Eropa yang juga sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan-kebijakan publik baik dalam politik lokalnya maupun dalam kebijakan politik luar negerinya. Misalnya, kelompok kepentingan yang terdapat pada negara Perancis dan Inggris. Kelompok-kelompok tersebut beraviliasi dengan organisasi-organisasi katolik, dan sering pula menggandeng serikat buruh untuk memenuhi kepentingan kelompoknya. Pengaruh kelompok kepentingan di Perancis dapat dilihat dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Perancis yang melarang penggunaan identitas keagamaan di ruang-ruang publik misalnya penggunaan jilbab. Di Inggris misalnya juga terdapat kelompok kepentingan yang berupa organisasi buruh yang menentang kebijakan pemerintah Inggris yang mengizinkan pekerja dari negara lain.

Keterlibatan kelompok kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan publik dalam politik lokal maupun politik luar negeri tidak hanya terjadi dalam negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Australia tetapi juga terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Dengan adanya fenomena

² Zulkifli hamid. 1999. *Sistem Politik Austalia*. P2P LIPI. Jakarta, Hal 297-317

tersebut terjadi perkembangan yang menarik dalam dunia internasional yang berimplikasi terhadap aktor/pelaku hubungan internasional dan tidak terkecuali di Indonesia.

Arus perubahan dalam politik global telah menjadikan isu internasional semakin kompleks. Pemahaman kontelasi politik dan kemampuan merespon secara tepat isu-isu yang ada sekarang dan di masa yang akan datang, diperlukan oleh negara dalam formulasi dan implementasi kebijakan politik luar negerinya, tidak terkecuali Indonesia. Karakteristik dan dimensi hubungan internasional yang juga menjadi rumit menuntut politik luar negeri Indonesia untuk memiliki kemampuan adaptif, antisipatif, dan efektif yang berpijak pada kekuatan ide, pemikiran, dan penuh prakarsa³.

Setelah berakhirnya perang dingin, Indonesia merupakan negara yang aktif dalam arena politik global. Karena posisi Indonesia yang sangat strategis menyebabkan keberadaan Indonesia sangat diperhitungkan dalam dunia internasional. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai saat ini telah terjadi perubahan yang mendasar baik dalam lingkungan politik domestik Indonesia maupun dalam ruang lingkup regional dan internasional.

³ Ganewaty wuryandary dan ikrar nusa bakti, " *kendala yang dihadapi oleh politik luar negeri Indonesia*", di ganewaty wuryandary(ed), *politik Luar Negeri Indonesiadi Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. Hal 4

Maka sejak pemerintahan Soekarno sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini pun telah mengalami perubahan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia baik dalam hubungan secara bilateral, regional, maupun internasional. Tetapi pada dasarnya prinsip politik luar negeri Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang didasarkan pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Perubahan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia Misalnya Telah terdapat kecenderungan kuat dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk lebih memfokuskan pada multilateralisme melalui berbagai macam kerjasama regional di kawasan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, seperti kerjasama melalui APEC(*asia pacific economic cooperation*), ASEAN+3, EAS(*east asian summit*)⁴.

Secara umum ada perubahan mendasar antara era Orde Baru dan pasca Orde Baru dalam konteks aktor perumusan kebijakan bahkan pelaksanaan kebijakan. Pada masa orde baru terjadi *eksekutive heavy* dimana parlemen tidak diberi ruang untuk bersuara, sedangkan pasca orde baru ada kesempatan parlemen berpartisipasi dalam konteks pluralism kebijakan politik luar negeri. Pasca orde baru terbangun sebuah pluralism dimana aktor-aktor non-kepresidenan sudah

⁴ Ganewaty wuryandar dkk.2008.*politik Luar Negeri Indonesiadi Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka pelajar. Yogyakarta

mulai memberi semacam kontribusi besar. Realitas perubahan tidak terlepas perubahan lingkungan domestik yang juga berubah secara mendasar⁵.

Dalam lingkungan domestik yang tengah dilanda euphoria demokrasi pasca runtuhnya era Orde Baru, ada kecenderungan dalam masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu Masyarakat Madani (*civil society*) yang ditandai dengan adanya *public sphere* yaitu ruang yang cukup bagi masyarakat untuk dapat dengan leluasa melakukan aktivitas sosial, politik dan ekonominya tanpa didominasi oleh segolongan kecil orang. Di dalam *public sphere* ini, warga masyarakat akan memiliki akses yang luas kepada lembaga-lembaga, baik lembaga negara seperti birokrasi, lembaga perwakilan dan peradilan, maupun lembaga non-negara seperti partai politik dan kelompok kepentingan.

Partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang bergerak dalam organisasi sosial-kemasyarakatan seperti yang mewakili kelompok profesi tertentu(federasi serikat pekerja seluruh Indonesia[FSPSI], HKTI, HNSI, dan PGRI), ataupun kelompok kepentingan yang merupakan representasi kepentingan tertentu (Kadin, Gapensi, IDI, DII). Selain itu terdapat kelompok kepentingan konvensional/keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, al-Wasliyah, persatuan Islam Tarbiyah Indonesia (Perti), Majelis Wali Gereja,

⁵ Ibid. hal 237.

Dewan Gereja Indonesia, Walubi, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan lain sebagainya.

Disamping itu terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang bergerak dalam organisasi sosial dan politik yang termasuk dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *non-Government Organizations* (NGO'S).seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Walhi, YLKI, Komnas HAM, yang terkadang mengambil alih peranan partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, mengisi ruang publik dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Hal ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk turut andil dalam perumusan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis menganggap perlu untuk menguraikan lebih lanjut, mengkaji serta menganalisa fenomena di atas dengan judul penelitian : **“Pengaruh Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia”**.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Penelitian dengan judul **“Pengaruh Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia”** hanya akan dibatasi pada sejauh mana pengaruh kelompok kepentingan serta peranan kelompok kepentingan terhadap perumusan dan implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Selain itu karena ruang lingkup kelompok kepentingan sangat luas maka penulis hanya akan membatasi pada kelompok kepentingan yang berbasis keagamaan dalam hal ini agama islam. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan Islam sebagai agama mayoritas. Adapun rumusan masalah yang nantinya akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaruh kelompok kepentingan dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia?
2. Bagaimana peranan kelompok kepentingan dalam implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui pengaruh kelompok kepentingan dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peranan kelompok kepentingan dalam implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

3. Kegunaan penelitian.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Studi Hubungan Internasional di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi sehingga dapat menjadi bahan masukan berbagai pihak dan para pengambil kebijakan.

D. Kerangka konseptual

Pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dengan cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan⁶. Kelompok kepentingan menurut **Marcus Ethridge dan Howard Handelman** adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam satu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (*an organization that attempts to influence public policy in a specific area of importance to its member*)⁷. Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Kusumaatmadja bahwa :

Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang di tujukan keluar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Politik luar negeri adalah komponen dari kebijaksanaan politik nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi real di dalam negeri.

Sedangkan menurut **Chris Brown**, politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional

⁶ A. Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mohammad Yani.2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. RosdaKarya, Bandung hal 31.

⁷ Marcus Ethridge dan Hoawrd Handelman dalam Miriam Budiardjo. 2008. *Pengantar ilmu politik*. Gramedia, Jakarta. Hal 383.

terhadap dunia luar⁸. Kebijakan politik luar negeri merupakan upaya pemenuhan kepentingan nasional dalam ruang lingkup Internasional.

Menurut **Rossenau** sistem politik luar negeri dilihat sebagai bagian dari sistem politik nasional dan memaknakan sebagai keseluruhan sikap dan aktifitas dimana suatu masyarakat nasional yang terorganisir mencoba menanggulangi masalah serta memetik keuntungan dari lingkungan internasional dengan memperoleh masukan dari lingkungan eksternal dan internal, baik yang berupa dukungan maupun tuntutan yang selanjutnya akan menjadi output politik luar negeri setelah melalui konversi⁹. Tindakan berupa aksi atau respon terhadap rangsangan dari lingkungan, yang diselenggarakan untuk mengembangkan dan menerapkan upaya pencapaian tujuan nasional tertentu, sesuai komitmen dan diselaraskan dengan strategi. Tindakan merupakan langkah konkrit dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian dan situasi di luar negeri¹⁰.

Perumusan politik luar negeri menurut Agung dan Yanyan¹¹ dapat dibagi dalam beberapa cara di antaranya yaitu model pembuatan keputusan (*the decision-making model*) dengan asumsi dasar dari perspektif ini adalah bahwa

⁸ Ganewaty wuryandary dkk.2008.*politik Luar Negeri Indonesiadi Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. Hal 14.

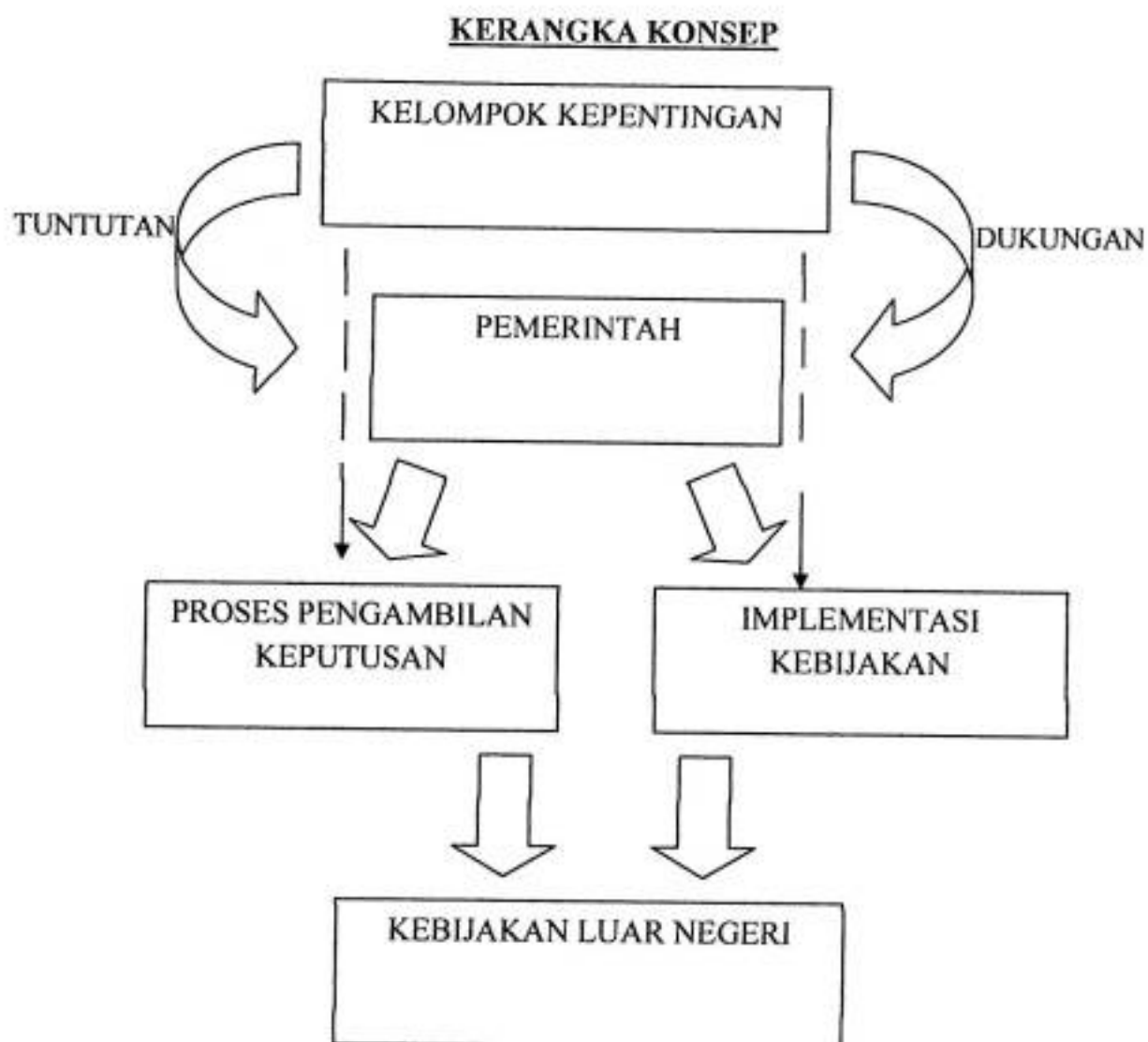
⁹ Mochtar Mas'oeed dalam Teuku May Rudy, 1993. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa. Bandung hal 75.

¹⁰ James N. Rosenau dkk. Dalam Teuku May Rudy, 1993.*ibid*

¹¹ A. Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mohammad Yani.2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. RosdaKarya. Bandung hal 60-70.

tindakan-tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Prosedur ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi yang kompleks dengan prosedur kelembagaanya. Faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan(*decision makers*)¹².

¹² *Ibid.* hal 64.



Ket: gambar dibuat atas interpretasi penulis.

E. Metode penelitian

1. Tipe penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, menjelaskan pengaruh kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Disamping itu penulis juga menuliskan peranan kelompok

kepentingan dalam pengimplementasian kebijakan politik luar negeri Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Menelaah sejumlah literature yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari buku, jurnal, ataupun media online (internet). Data ini diperoleh melalui kunjungan penulis ke beberapa tempat seperti perpustakaan umum dan lembaga-lembaga yang terkait yaitu :

- a. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri Indonesia di Jakarta
- b. Perpustakaan dan Dokumentasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional (UPDHI) Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta.
- c. Perpustakaan Wilayah di Makassar.
- d. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional (HIMAHI) UNHAS di Makassar.
- e. Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS di Makassar.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature. Adapun data sekunder yang dibutuhkan

adalah data tentang kelompok kepentingan yang ada di Indonesia dalam mempengaruhi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Dengan teknik ini penulis menganalisa masalah berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temukan kemudian mengolahnya untuk menarik kesimpulan.

5. Metode penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif. Dengan metode ini, penulis menguraikan permasalahan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menguraikan permasalahan secara khusus sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan. Hal-hal yang sifatnya umum misalnya kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Indonesia, sedangkan yang bersifat khusus lebih mengarah pada peranan dan pengaruh kelompok kepentingan dalam pengimplementasian Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bab II

Telaah Pustaka

Pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Menurut Norman Barry¹³ pengaruh dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya (*influence is a type of power in that a person who influence to act in certain way may be said to be caused to act, even though an over threat sanctions wil not be the motivation force*).

Menurut Rubienstein¹⁴ secara konsep multidimensi, konsep pengaruh dapat diidentifikasi dari pada diukur oleh beberapa kebenaran. Pada keseluruhan, pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat dan memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi.

¹³ Norman Barry. Dalam Merriam budiardjo.2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Hal 67

¹⁴ Rubienstein. Dalam A. agung banyu perwita dan yanyan mohammad yani.2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. RosdaKarya. Bandung hal 31.

Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang, dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadangkala mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu seringkali cukup berhasil.

A. Kelompok Kepentingan

Dalam sistem politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan merupakan salah satu struktur politik (lembaga politik) dari sistem politik yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan/dukungan pemerintah). Menurut Gabriel Almond dan G. B. Powell¹⁵

“Kelompok kepentingan adalah sekelompok individu yang dihubungkan dengan ikatan kepentingan atau keuntungan yang dengan sadar akan pembagian kepentingan-kepentingan tersebut”.

Haryanto mengemukakan “pengertian kelompok kepentingan diartikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan”¹⁶. Kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tersebut dapat terrealisasi dengan baik, apabila ada akses untuk menyalurkannya. Apabila

¹⁵ Gabriel a. almond dan G.B Powel dalam Haniah Hanafie. 1997. *ICMI Sebagai kelompok Kepentingan.* hal 16.

¹⁶ Haryanto, dalam Haniah Hanafie, ibid hal 16.

tidak ada akses, biasanya kelompok kepentingan melakukan penekanan pada pemerintah, agar tujuan, kepentingan, dan keinginannya tercapai. Untuk itu, menurut Haryanto, istilah "*Pressure Group* atau kelompok penekan sering dipergunakan untuk menyebut kelompok kepentingan, karena kelompok kepentingan sering muncul untuk menekan pemerintah.

Sedangkan menurut Zulkifli Hamid "yang dimaksud dengan kelompok penekan adalah setiap asosiasi yang membuat tuntutan, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada pemerintah, dalam rangka mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, tanpa sendiri ia harus memiliki kekuasaan formal untuk memerintah"¹⁷. Kelompok penekan bertindak mempengaruhi pemerintah (dan partai-partai oposisi) dengan satu atau beberapa isu tertentu, tetapi tidak memegang kekuasaan bagi diri atau kelompok mereka.

Kelompok penekan sangat sadar terhadap peran mereka untuk memajukan kepentingan kelompok mereka yang diwakilinya, dan karenanya mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Kelompok penekan memiliki kesadaran kehidupan politik yang tinggi. Pada umumnya kelompok penekan melakukan berbagai aktivitas dan taktik politik, dari yang bersifat konvensional sampai kepada yang non-konvensional, untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

¹⁷ Zulkifli Hamid.1999. *Sistem Politik Australia*. hal 297-298

publik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki kelompok yang diwakilinya.

Jadi kelompok penekan dan kelompok kepentingan mempunyai tujuan yang sama yaitu selalu berusaha mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, namun kelompok penekan dalam mempengaruhi kebijakan publik selalu melakukan tekanan kepada pemerintah, sedangkan kelompok kepentingan dalam usaha mempengaruhi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan hanya dalam bentuk tekanan tapi bisa berupa dalam bentuk dukungan atau tuntutan terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan Mohtar Mas'ood mengemukakan bahwa "Suatu kelompok kepentingan dapat pula diartikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa pada waktu yang sama, berkeinginan memperoleh jabatan publik"¹⁸.

Sering kali kelompok kepentingan terlibat penseleksian calon-calon partai dan selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Marcus Ethridge dan Howard Handelman.

¹⁸ Mohtar Mas'ood dalam Haniah Hanafie. Ibid hal 16.

Kelompok kepentingan menurut Marcus Ethridge dan Howard Handelman¹⁹ adalah :

“Suatu organisasi yang berusaha untuk memperngaruhi kebijakan publik dalam satu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (*an organization that attempts to influence public policy in a specific area of importance to its member*)

Kemudian Mohtar Mas'ood menambahkan bahwa kelompok kepentingan diorganisasikan atas kesukuan, ras, etnis, agama, atau issue-issue kebijaksanaan. Kelompok yang paling kuat, paling besar dan dari segi keuangan paling kuat adalah kelompok-kelompok yang didasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi, terutama karena mata pencaharian dan karir seseorang yang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan aktifitas pemerintah²⁰.

Kelompok kepentingan menjadikan kelompok mereka sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik, hal ini mengakibatkan kelompok kepentingan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem politik.

Karena beragamnya kelompok kepentingan ini Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam bukunya *Comparative Politics Today: A World View (1992)*²¹ membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori yaitu:

¹⁹ Marcus Ethridge dan Hoawrd Handelman dalam Miriam Budiardjo. 2008. Pengantar ilmu politik. Gramedia. Jakarta. Hal 383.

²⁰ Loc.cit hal 17.

²¹ Miriam budiardjo.2008. *Dasar-dasr ilmu politik*. Gramedi Pustaka. Jakarta

1. Kelompok Anomi

Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustrasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Ketidakpuasan ini diungkapkan melalui demonstrasi dan pemogokan yang tak terkontrol, yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan.

Ledakan emosi yang sering tanpa rencana yang matang, dapat saja muncul secara tiba-tiba, tetapi dapat juga cepat mereda. Akan tetapi jika keresahan tidak segera teratasi maka masyarakat dapat memasuki keadaan anomie, yaitu situasi *chaos* dan *lawlessness* yang diakibatkan runtuhnya perangkat nilai dan norma yang sudah menjadi tradisi, dan disertai tidak adanya nilai-nilai yang baru yang dapat diterima secara umum.

2. Kelompok Non-asosiasional

Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak kerabat, saudara, agama, wilayah kelompok, etnis dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan dari pada kelompok anomie. Anggota-anggotanya merasa mempunyai ikatan batin

karena mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan.

kegiatan kelompok ini terutama sekali merupakan ciri masyarakat yang belum maju, dimana kesetiaan, kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan selain itu kelompok jenis ini juga bisa terdapat di negara-negara industri maju . Mereka pada umumnya terdiri dari keluarga-keluarga yang berpengaruh, tokoh-tokoh lokal, dan pemimpin-pemimpin agama yang sering lebih berpengaruh dari pada organisasi kelompok tertentu.

3. Kelompok Institusional

Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Kelompok kepentingan ini sering kali mendapat dukungan dari partai politik, korporasi bisnis, atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobbying.

4. Kelompok Asosiasional

Kelompok kepentingan yang tergabung dalam kategori ini adalah terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi-

organisasi ini di bentuk dengan satu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf bekerja penuh waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya.

Sebagai suatu kelompok kepentingan yang akan menyalurkan kepentingan-kepentingannya pada kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kelompok kepentingan. Menurut Gabriel A. Almond²² ada empat jalur kelompok kepentingan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (*channel of Access and Tactics of influence*) yaitu ;

1. Personal Connection

Jalur yang dimaksud di sini adalah keluarga, sekolah, dan daerah dan ikatan-ikatan social yang dipakai sebagai alat untuk mengadakan kontak dengan elit-elit politik.

2. Elite Representation

Jalur ini biasanya melalui anggota kelompok yang berada dalam struktur pembuat keputusan atau perwakilan simpatisan dari seorang anggota elite yang tidak memihak (*independen*). Biasanya jalur ini sangat

²² Gabriel A. Almond dan Powell dalam Op cit.

efektif bagi kelompok kepentingan dalam menyalurkan kepentingan-kepentingannya.

3. Formal and institutional

Keberadaan jalur ini biasanya di dalam sebuah sistem politik modern.

Bentuk jalur ini melalui tiga cara yaitu :

a. Mass media

b. Political parties

Untuk negara yang memiliki sistem satu partai seperti di Meksiko, partai merupakan jalur yang sangat vital (utama) untuk penyaluran kepentingan. Berbeda dengan di negara komunis. Justru partai lebih mengontrol kelompok-kelompok kepentingan dari pada mengkomunikasikan tuntutan-tuntutannya.

c. Legislatures, Cabinets, and Bureaucratic Agencies.

4. Protest demonstrations

Jalur ini biasanya dipakai oleh kelompok Anomik yang merupakan gerakan atau aksi spontan, tetapi juga digunakan oleh kelompok Assosiasional sebagai saluran *unconventional*. Di negara demokratis, *protest demonstration* ini merupakan tujuan utama untuk memobilisasi dukungan umum.

Sedangkan Mohtar Mas'ued²³ menggunakan istilah saluran untuk mencapai kaum berpengaruh. Saluran-saluran yang dikemukakan pada dasarnya sama seperti yang dikemukakan oleh Almond yaitu :

1. Demonstrasi dan kekerasan, misalnya : huru-hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lain-lain. Jadi seperti kelompok Anomik.

2. Hubungan pribadi.

Hubungan ini biasanya melalui hubungan keluarga, asal sekolah (almamater) atau hubungan yang bersifat kedaerahan. Jadi sifatnya tidak formal.

3. Perwakilan langsung atau perwakilan elit.

Perwakilan dalam badan legislatif atau birokrasi. Perwakilan ini dapat berlangsung atau berjalan apabila kelompok kepentingan yang bersangkutan mempunyai anggota-anggota yang duduk di dalam badan legislatif atau badan eksekutif. Jadi sifatnya agak formal.

4. Saluran formal dan institusional lain.

a. Media massa, TV, Radio, Surat kabar.

b. Partai Politik

c. Badan legislative, kabinet dan birokrasi

²³ Mohtar Mas'ued. *Op cit* hal 22.

Saluran-saluran tersebut dipergunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempengaruhi struktur pembuat keputusan politik, agar tuntutan atau kepentingan-kepentingan mereka berhasil. Jadi kelompok kepentingan ini dapat menggunakan saluran yang resmi (formal) atau tidak resmi (non-formal). Tergantung saluran yang mana yang efektif untuk ditembus.

Efektifnya kelompok kepentingan di dalam menyalurkan kepentingannya tergantung pada issue-issue yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Selain itu tergantung bagaimana kelompok itu mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumber daya dari anggotanya. Seperti kemampuan financial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi dan prestisenya di mata masyarakat umum atau para pembuat keputusan pemerintahan.²⁴

Kelompok kepentingan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kebijakan tersebut pada akhirnya hanya akan mementingkan kelompok tertentu dalam hal ini kelompok kepentingan.

B. Kebijakan Politik Luar Negeri

1. Konsep Dasar Politik Luar Negeri..

Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan

²⁴ Mohtar Mas'oed, *op cit* hal 24.

kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Politik luar negeri terdiri dari dua komponen dasar yaitu politik (*policy*) dan luar negeri. Politik (*policy*) yaitu seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Politik luar negeri suatu negara merupakan pedoman atau penuntun dalam berinteraksi dengan negara lain dalam arena sistem internasional. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan luar negeri yang mengatur hubungan luar negeri suatu negara. Tanpa politik luar negeri suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri akan mengalami kesimpang siuran karena tidak ada tujuan yang pasti sehingga hasilnya tidak maksimal. Politik luar negeri yang sudah ditetapkan terkadang dalam pelaksanaannya tidak mencapai hasil yang maksimal.

Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Sumpena Prawira Saputra²⁵ bahwa :

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang sedang dihadapi, lazimnya di sebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya ia merupakan suatu pola / respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi pengalaman, kekayaan

²⁵ Sumpena prawira saputra. 1985. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Remadja Karya. Jakarta hal 7

alam serta kebudayaan yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan di akomodasikan di dalam konstitusi.

Dengan demikian bahwa politik luar negeri merupakan politik dalam negeri yang ditujukan keluar negeri dengan tetap memperhatikan situasi sekelilingnya(sistem internasional) yang terjadi. Dalam membahas politik luar negeri, terdapat tiga determinan penting yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu : kepentingan nasional(*national interest*), kemampuan nasional(*national capability*) dan kondisi internasional yang melingkupinya dengan segala dinamikanya.

Determinan yang pertama adalah kepentingan nasional. Pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu upaya pemenuhan tercapainya kepentingan nasional. Maka segala langkah-langkah yang diambil dalam rangka kebijaksanaan luar negerinya tidak lepas dari apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Chris Brown²⁶ :

politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Kebijakan politik luar negeri merupakan upaya pemenuhan kepentingan nasional dalam ruang lingkup Internasional.

²⁶ Ganewaty wuryandar dkk.2008.*politik Luar Negeri Indonesiadi Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. Hal 14.

Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikemukakan oleh Joseph Frankel²⁷ tentang defenisi dari politik luar negeri bahwa :

Politik luar negeri suatu negara merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya yang ditujukan ke luar negeri yang tidak terlepas dari tujuan-tujuan nasional dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.

Determinan yang kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri dan politik internasional adalah adalah kekuatan nasional. Kekuatan nasional adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara yang bersifat aktual maupun yang tersimpan. Kekuatan aktual adalah kekuatan nyata yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat dimunculkan pada saat-saat tertentu.

Determinan yang ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Suatu negara dalam menuangkan kepentingan nasionalnya dalam kebijakan politik luar negeri harus mampu melihat dan menyesuaikan dengan kondisis domestik, regional maupun kondisi global yang melingkupinya. Hal ini penting karena dinamika sistem internasional selalu mengalami perubahan setiap waktu disebabkan interaksi yang terus menerus antara negara di dunia.

Kondisi internasional yang dinamis mengharuskan suatu negara yang ingin memenuhi kepentingan nasionalnya diluar batas-batas teritorialnya untuk membuat penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan internasionalnya dengan asumsi bahwa lingkungan internasional umumnya memiliki kekuatan

²⁷ J. frankel, 1990. *Hubungan Internasional* .ANS Sungguh Bersaudara. Jakarta hal.54-55

untuk mempengaruhi suatu negara ketimbang sebaliknya. Dalam hal ini keberhasilan suatu politik luar negeri akan sangat bergantung pada bagaimana suatu negara melihat dan membaca suatu kondisi internasional, kemudian menyesuaikan dengan kebijakan politik luar negerinya.

Menurut Anak Agung Prawira dan rekan²⁸ dalam kebijakan politik luar negeri dibutuhkan tiga konsep dasar untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu :

- a. Kebijakan luar negeri sebagai kumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*) merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
- b. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitmen to and plan for action*). Pada tingkatan ini rencana tingkatan politik luar negeri akan memberikan pedoman bagi:
 - i.) Tindakan yang ditujukan pada situasi yang berlangsung lama.
 - ii.) Tindakan yang ditujukan pada negara-negara tertentu.
 - iii.) Tindakan yang ditujukan pada isu-isu khusus.

²⁸ *Loc.cit*, Anak Agung Prawira dan Yanyan Muhammad Yani. Hal 53-55

- iv.) Tindakan yang ditujukan pada berbagai sasaran lainnya.
- c. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkatan ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkatan yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.

2. Tujuan Politik Luar Negeri

Tujuan politik luar negeri merupakan fungsi dari proses di mana negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi masa mendatang. Tujuan kebijakan politik luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pencapaian perdamaian, keamanan, dan kekuasaan merupakan dasar tujuan jangka panjang²⁹.

Kebijakan politik luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kebijakan politik luar negeri merupakan formulasi yang konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* untuk mencapainya. Tujuan dirancang,

²⁹ James N. Rosenau, *ibid* hal.51

dipilih, ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional³⁰. Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain.

Menurut K.J. Holsti³¹ ada tiga kriteria politik luar negeri untuk mengklasifikasikan sebagai negara tujuan politik luar negeri suatu negara yaitu :

- a. Nilai (*values*) yang menjadi tujan dari para pembuat keputusan.
- b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek(*short-term*), jangka menengah(*middle-term*) dan jangka panjang(*long-term*).
- c. Tipe tuntutan yang diajukan oleh suatu negara kepada negara lain.

3. Sumber-sumber Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri mulai dalam proses perumusan sampai pada pengambilan keputusannya sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dengan kata

³⁰ Jack O Plano dan Roy Olton, *ibid* hal 51

³¹ K. J Holsti, *ibid* hal. 51

lain bahwa yang menjadi sumber-sumber kebijakan politik luar negeri (determinan) adalah faktor-faktor yang mendasari dan yang menentukan rencana-rencana serta pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan.

Menurut Howard Lentner³² determinan kebijakan politik luar negeri dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik. Determinan luar negeri mengacu pada keadaan *sistem internasional* dan *situasi* pada suatu waktu tertentu. Sistem internasional didefinisikan sebagai pola interaksi di antara negara-negara yang terbentuk/dibentuk oleh struktur interaksi di antara pelaku-pelaku yang paling kuat (*most powerfull actor*). Sedangkan konsep situasi diartikan sebagai pola-pola interaksi yang tidak tercakup/mencakup keseluruhan sistem internasional. Dengan demikian situasi sebagai suatu alat analisis dapat memberikan alat untuk menentukan lingkungan eksternal yang relevan bagi pembuat keputusan (*decision-makers*). Selain itu konsep ini berfungsi juga sebagai alat untuk menghubungkan dua unit analisis yang lainnya yaitu negara dan sistem internasional.

Determinan domestik merujuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu untuk berubah, yaitu :

- a. *Highly stable determinants* terdiri atas luas geografi, lokasi, bentuk daratan, iklim, populasi, serta sumber daya alam.

³² Howard Lentner, *ibid* hal 55.

- b. *Moderately stable determinants* terdiri atas budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik.
- c. *Unstable determinants* yaitu sikap dan persepsi jangka panjang serta faktor-faktor ketidaksengajaan.

4. Pengambilan Keputusan Dalam Politik Luar Negeri.

Politik luar negeri bisa dipandang, sebagai *output* dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Tiga pertimbangan itu adalah : (1) kondisi dalam negeri pemngambil keputusan, (2) kemampuan ekonomi dan militer, (3) konteks internasional, yaitu posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional³³.

Para perumus kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara adalah orang-orang yang dihadapkan pada situasi-situasi tertentu, yang bertanggung jawab kepada orang lain , yang ditekan oleh beragam kondisi, dan dipaksa mengambil keputusan. Sehingga William D. Coplin dan Marsedes Marbun³⁴ mengemukakan tiga jenis keputusan politik luar negeri yaitu (1) keputusan politik luar negeri yang sifatnya umum, (2)

³³ William D. Coplin 2005. *Pengantar Politik Internasional Suatu telaah Teoritis*, Sinar Baru. Bandung.

³⁴ William D. Coplin dan Marseden Marbun ibid hal 32-34.

keputusan politik luar negeri yang bersifat administratif, dan (3) keputusan-keputusan yang bersifat kritis.

Keputusan kebijakan luar negeri yang sifatnya umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Agak sukar menentukan sifat suatu kebijakan umum di bidang politik luar negeri. Sering kali pernyataan politik luar negeri tidak mengungkapkan sifat kebijakan yang sebenarnya, tetapi merupakan suatu cara yang sering digunakan dalam interaksi dalam negara.

Keputusan politik luar negeri yang sifatnya administratif adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Departemen luar negeri adalah organisasi birokratis yang utama namun, badan-badan pemerintah lainnya seperti dinas militer, dinas intelijen, dan departemen perdagangan, terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan administratif yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Tipe keputusan kebijakan politik luar negeri yang ketiga adalah keputusan yang bersifat krisis, merupakan kombinasi dari dua tipe politik luar negeri yang terdahulu. Keputusan krisis ini muncul pada segala aktivitas, tetapi yang paling utama adalah dalam bidang politik luar negeri. Karena hubungan-

hubungan dasar antarnegara bergantung pada cara tawar menawar antara negara yang satu dengan yang lain. Dan bukan dalam hal institusi-institusi umum yang mengatur perilaku mereka, krisis ini sudah lazim dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, baik secara sengaja diciptakan oleh suatu partai maupun sebagai efek yang tidak sengaja.

Jadi pengambilan keputusan politik luar negeri merupakan campuran antara kebijakan luar negeri secara umum, keputusan-keputusan administratif, serta pengambilan keputusan yang bersifat krisis. Posisi kebijakan luar negeri umum merupakan produk dari tindakan yang diambil oleh para pejabat administratif dari tingkat yang lebih rendah sebagai bagian dari kegiatan rutin mereka, seperti produk keputusan yang diambil pada masa krisis. Selaras dengan itu kebijakan luar negeri umum digunakan sebagai pedoman bagi para pengambil keputusan untuk masalah-masalah rutin dan hal-hal yang bersifat krisis pada saat dibutuhkan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KELOMPOK KEPENTINGAN DAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA.

A. Kelompok Kepentingan Di Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pasca lengsernya rezim Soeharto (Orde Baru) semangat untuk menciptakan negara yang demokratis melanda masyarakat Indonesia. Hal ini juga mendukung munculnya kelompok masyarakat dalam masyarakat Indonesia, yang memang sedari awalnya merupakan bangsa yang majemuk, berupa kelompok masyarakat yang mana termasuk di dalamnya kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Indonesia ruang lingkup sangat luas. Hal ini didukung dengan lingkungan yang kondusif untuk terbentuknya kelompok kepentingan.

Salah satu kelompok kepentingan yang paling berkembang di Indonesia adalah kelompok kepentingan yang membawa kepentingan masyarakat muslim yaitu Agama Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas memeluk Agama Islam yaitu sekitar 90% dari total penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan karena Islam memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat bagi terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Islam masuk di Indonesia pada abad

ke-7 masehi melalui interaksi perdagangan antara masyarakat dengan pedagang yang berasal dari bangsa arab.

Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak dengan kekerasan melainkan disebarkan secara damai melalui jalur dakwah. Selain itu dalam penyebaran Agama Islam para ulama sering mengikutkan nilai-nilai lokal dalam proses Islamisasinya (seperti penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa dalam hal ini Walisongo). Selain itu proses Islamisasi di Indonesia tidak lepas dari bantuan dan pertolongan yang diberikan oleh para penguasa lokal pada masa itu.

Sebelum Islam masuk di Indonesia, masyarakat Indonesia telah memeluk Agama Hindu dan Agama Budha serta kepercayaan Animisme. Akibat dari penyertaan nilai-nilai lokal dalam penyebarannya, nilai-nilai lokal berupa kebiasaan-kebiasaan lama dalam hal ini tradisi-tradisi Agama Hindu dan Agama Budha sering dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam yang biasanya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Melihat hal ini muncul semacam gerakan pembaharuan Islam yang bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat Indonesia³⁵.

Islam merupakan bagian dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari proses perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari

³⁵ A. syafii Maarif. 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia*. Mizan. Bandung hal. 162

Belanda dan Jepang sampai pada penyusunan dasar dan landasan konstitusi Indonesia. Para pemimpin Islam di Indonesia dari semua golongan menjelang dan sesudah Proklamasi kemerdekaan berupaya agar pelaksanaan syariah diakui secara konstitusional. Piagam Jakarta merupakan puncak perjuangan dari perjuangan konstitusional itu. Piagam ini merupakan kompromi politik-ideologis antara golongan yang beraspirasi Islam dan Kelompok Nasionalis yang sebagian besar juga menganut Agama Islam, tapi menolak Islam sebagai ideologi dasar negara³⁶.

Pada saat itu diktum pelaksanaan Syariat Islam dicoret dari UUD, demi keutuhan dan persatuan bangsa. Sebagai imbangannya Sila Pertama Pancasila yang semula berbunyi *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, diganti dengan : *Ketuhanan yang maha esa*, sebagai simbol tauhid dalam sistem iman umat Islam.

Pasca pergantian rezime Soeharto yang terjadi pada pertengahan 1998, Indonesia berada pada masa transisi dari negara yang cenderung otoriter ke negara yang menjadi negara penganut paham demokrasi. Sehingga kebebasan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang bisa dirasakan oleh semua kelompok masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang politik. Dampak dari perubahan

³⁶ A. syafii Maarif . *ibid*

tersebut adalah adanya kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa, sehingga masyarakat bebas membentuk organisasi.

Dalam kurun waktu satu tahun terbentuk kurang lebih partai politik baru dan sekitar 10 di antaranya merupakan Partai Islam. Di samping itu sejumlah Organisasi Islam diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Lasykar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Hizbuttahrir Indonesia. MMI, FPI, dan Hizbuttahrir merupakan kelompok kepentingan yang muncul sebagai reaksi langsung ataupun tidak langsung dari krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kelompok kepentingan Islam ini menganggap bahwa Indonesia yang mengalami krisis ekonomi tidak dapat bangkit dari keterpurukan ekonominya sepanjang Islam tidak dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada negara Indonesia.

Sedangkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan kelompok kepentingan yang sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang ini. Kedua organisasi Islam ini merupakan kelompok kepentingan yang berasaskan penegakan syariah Islam di Indonesia yang paling kuat akar dan banyak pengikutnya di Indonesia . sehingga bisa dikatakan bahwa mereka merupakan representatif dari kelompok kepentingan Islam di Indonesia. Berikut sekilas tentang profil kelompok kepentingan islam yang ada di Indonesia :

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 november 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Organisasi ini muncul sebagai akibat keprihatinan atas kondisi umat islam yang kehilangan induknya yaitu runtuhnya kekuasaan Ottoman di Turki dan perpecahan Negara-Negara Arab. Muhammadiyah sejak awal pembentukannya sudah bersifat pluralistik dan menganut paham modernism. Secara garis besar ada dua hal yang ingin dicapai secara serempak oleh Ahmad Dahlan yaitu pertama, melepaskan umat islam dari kungkungan tahayul, bid'ah, khurafat yang membelenggu umat dari pemahaman tauhid yang benar, yang kedua, memajukan pendidikan umat islam dengan memberikan angkatan mudanya ilmu-ilmu barat dalam rangka merebut kebahagiaan dunia yang juga harus dikejar oleh umat Islam.

Muhammadiyah merupakan kelompok kepentingan Islam dengan gerakan Tajdid yaitu jalan tengah antar modernisme dan tradisionalisme. Mengambil yang bisa berdampak positif serta berguna bagi perkembangan bagi Islam itu sendiri dari luar (dunia barat) tapi tidak gampang terpengaruh sehingga meninggalkan nilai Islam itu sendiri. Pada awal berdirinya Muhammadiyah merupakan organisasi sosial masyarakat yang hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Namun akibat dari adanya gejolak politik lokal yang

melibatkan PKI, yang menurut Muhammadiyah merupakan adalah bencana nasional³⁷, yang ditindak lanjuti berupa penyelenggaraan konferensi kilat.

Konferensi kilat ini memutuskan agar Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dapat diberi hak-hak politik seperti halnya partai politik. Karena keadaan yang tidak memungkinkan³⁸ dimana perang kepentingan baik dalam kalangan intern Muhammadiyah sendiri maupun di luar Muhammadiyah. Namun berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua K.H. Ahmad Badawi tanggal 17 April 1966 nomor 9, yang tujuannya :

- a. Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik.
- b. Politik adalah salah satu bidang amal Muhammadiyah yang dilaksanakan berdasarkan atas dasar fungsinya.
- c. Pendirian partai politik oleh Muhammadiyah harus dimusyawarahkan dalam muktamar atau tanwir.
- d. Muhammadiyah menginginkan satu partai Islam untuk satu seluruh ummat Islam.
- e. Menyerukan kepada semua golongan Islam untuk menggiatkan dakwah Islamiyah dan usaha Kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat.

³⁷ Majelis Diktilitbang dan LPI Muhammadiyah. syarifuddin (ed).2010. *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. Kompas. Jakarta hal 198-225.

³⁸ Lihat dalam ibid.hal 200-225.

Pernyataan tersebut dapat meredakan suasana dan sidang tanwir yang dilaksanakan pada tanggal 19-25 juni 1966 dengan menghasilkan putusan berupa spernyataan pimpinan pusat, Muhammadiyah tidak menjadi partai politik namun mendirikan sebuah partai yang berbasiskan Islam. Persentuhan Muhammadiyah dengan politik selama periode transisi mendorong gerakan ini untuk merumuskan kebijakan yang meneguhkan identitas dan jati diri sebgai gerakan sosial keagamaan.

Pengalaman sejarah Muhammadiyah bersinggungan dengan politik sejak masa kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru telah memberikan pelajaran berarti bagi perjalanan persyarikatan ini dalam menyikapi hubungannya dengan politik. Berdasarkan sejarah terutama yang menyangkut masalah Muahmmadiyah dengan politik, sebenarnya bisa dikatakan tidak bersih dari praktik politik. Pada masa Orde Lama Muhammadiyah merupakan kekuatan utama Partai Masyumi³⁹, pada masa Orde Baru Muhammadiyah mewadahi pembentukan Partai Parmusi⁴⁰.

Pasca runtuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, dimana Suharto dilengserkan sebagai presiden republik Indonesia. Masyarakat umum menganggap bahwa terbentuknya Partai Amanat Nasional(PAN) karena restu

³⁹ Ibid hal 125-172.

⁴⁰ Ibid hal 222-225.

Muhammadiyah. Melalui sidang tanwir Semarang 1998, dan PP mengizinkan atas amanah tanwir untuk melakukan ijtihad politik guna merespon perubahan politik yang berlangsung.⁴¹ Pada masa itu yang menjadi ketua umum PAN adalah ketua PP Muhammadiyah yaitu Amien Rais.

Artikulasi politik Muhammadiyah banyak dimanifestasikan oleh elit penentunya seperti Amien Rais. Reputasi Amien Rais dikalangan Muhammadiyah member efek positif bagi PAN. Partai ini dengan mudah berdiri di berbagai daerah atas dukungan warga Muhammadiyah. Amien Rais mendirikan PAN sebagai Ijtihad politik dalam bentuk politik praktis(*real politics*). Hasil keputusan Sidang Tanwir yang memberikan amanah kepada PP untuk melakukan dua hal : *pertama*, melakukan ijtihad politik guna mencapai kemaslahatan umat dan bangsa secara maksimal, yang senantiasa dilandasi semangat Islam amar makruf nahi mungkar; *kedua*, menyusun agenda reformasi (konsep dan strategi reformasi Muhammadiyah) di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menuju makin cepat terwujudnya masyarakat utama yang sejahtera. Amanah melakukan ijtihad politik ini ditafsirkan para elit-elit politik PAN sebagai bentuk keterkaitan Muhammadiyah-PAN.

⁴¹ Ibid hal 315.

Berdirinya PAN sulit dikatakan tidak berkaitan dengan Muhammadiyah. Hal ini dapat kita lihat di berbagai daerah di mana SDM, saran, elite, serta massa Muhammadiyah memberi kontribusi berdirinya PAN di daerah. Kompetisi politik pada periode 1998-2004, dimana banyak kader-kader Muhammadiyah yang menduduki jabatan dalam badan pemerintah, memberikan fakta bahwa PAN dan Muhammadiyah saling terkait satu sama lain. Pada pemilu tahun 2004 banyak elite-elite Muhammadiyah memberikan dukungan moral dan politik kepada Amien Rais yang merupakan kader terbaik dari Muhammadiyah.

Dalam menyikapi perubahan sistem politik dari sistem otoriter ke sistem demokrasi dapat kita lihat dari diberinya ruang untuk kaum perempuan dalam tubuh organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Dinamika politik perempuan pasca-penerimaan tuntutan aktivis perempuan dalam UU Pemilu, maka tercapai kesepakatan mengenai kuota perempuan 30 persen dalam UU pemilu tahun 2003. Walaupun hal semacam itu bukan yang baru dalam tubuh Muhammadiyah (karena dalam Muhammadiyah ada organisasi perempuan yaitu Aisyiyah) tetapi hal itu menunjukkan bahwa kelompok kepentingan ini sedapat mungkin mengikuti perubahan politik bangsa. Penerimaan unsur-unsur demokrasi (nilai-nilai HAM) dalam tubuh Muhammadiyah dapat dilihat dari hasil Sidang Tanwir 2002 di Bali dan tahun 2003 di Makassar.

Wacana tentang perlunya perempuan masuk dalam struktur Muhammadiyah merupakan titik tolak kesadaran mengenai kesederajatan posisi laki-laki dan perempuan. Secara konstitusi organisasi, perempuan diakui sebagai sumber kekuatan dan penggerak organisasi, karena itu perempuan diwadahi dalam struktur, artinya masuknya perempuan dalam struktur keorganisasian muhammadiyah menjadi keharusan, karena merupakan amanat konstitusi organisasi.

2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para ulama yang pada umumnya merupakan para pemimpin pondok pesantren. Tujuan dari Nahdlatul Ulama ada untuk memperjuangkan kepentingan Islam tradisional, terutama kehidupan pesantren. Nahdlatul Ulama adalah Organisasi Islam tradisional di Indonesia. Sebagai salah satu organisasi Islam tradisional maka pemahaman tentang masyarakat dan pemikiran Islam cenderung mapan. Hal ini karena mereka memegang teguh hukum Islam Ortodoks (yaitu, Mazhab Sunni atau aliran-aliran hukum Islam), yang mengantarkan mereka pada penolakan terhadap modernitas dan pendekatan rasional dalam kehidupan.

Sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama secara luas sebagai kelompok kepentingan Islam dari periode sebagai organisasi sosial keagamaan, periode

tengah sebagai organisasi keagamaan juga sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai dan paling terakhir kembali keaktivitas sosial keagamaan⁴². Keterlibatan NU dalam politik sudah terlihat ketika pada masa Orde Lama dengan juga ikut menjadi basis dukungan pada Partai Masyumi, sedangkan keterlibatan NU pada masa Orde Baru juga dengan cara menjadi basis dukungan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir Pada era reformasi yaitu tahun 1998 para petinggi NU ikut langsung memprakarsai lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemunculan PKB sebagai kekuatan partai politik yang membawa aspirasi warga nahdliyyin.

Perilaku politik dalam NU dengan mengacu pada kaidah fiqih yaitu: pertama, *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*. Maksudnya, kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan seutuhnya. Kedua, *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Artinya, mendahulukan upaya menghindari bahaya dari pada melaksanakan kemaslahatanyang mengandung resiko yang besar.

Ketiga, *idza ta'aradha mafsadataniru'iya a'dzamuha dlararan birtikabi akhaffima*. apabila terjadi dua bahaya, maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya.

⁴² GreG Fealy dan Greg Barton, 1997. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKS. Yogyakarta.

Keempat, *Al-hukum yaduru ma'a illatichi wujudan wa'adamaan*. Artinya hukum bergantung pada ada tidaknya sebuah illat. Dengan kata lain orientasi politik dari NU berada di antara tengah-tengah antara liberal dan konservatif⁴³.

3. Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis mujahidin adalah lembaga yang terbentuk melalui kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan pada tanggal 5-7 Agustus 2000. Kongres dengan tema 'Penegakan Syariat Islam'. Yang dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 Provinsi di Indonesia melahirkan sebuah amanah kepada sejumlah 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai ahlu Halli Wal Aqdi (AHWA)) untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin.

Majelis Mujahidin Indonesia bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin dengan tujuan untuk bersama-sama menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan sehingga Syariat Islam sebagai rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan negara secara nasional. Perjuangan MMI bersifat tansiq atau aliansi gerakan di antara umat Islam berdasarkan ukhuwah, kesamaan aqidah serta manhaj perjuangan. MMI mempunyai visi berupa upaya menegakkan syariat Islam

⁴³ M.N. Harisudin. *NU, Politik, dan Ali Maschan Moesa dalam Khamami Zada(ed)2010. Nahdlatul Ulama; Dinamika ideologi dan Politik kenegaraan. Kompas . Jakarta. Hal 202-205*

dalam kehidupan ummat Islam, dengan misi berjuang demi tegaknya syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah).

MMI yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir di Yogyakarta di anggap sebagai (kelompok kepentingan islam) yang paling radikal. Kongres MMI pada tanggal 7 Agustus 2000 mendeklarasikan pernyataan yang disebut piagam Yogyakarta.

Piagam Yogyakarta pada prinsipnya terdiri atas lima butir kesepakatan kewajiban menjalankan syariat islam bagi ummat Islam di Indonesia dan dunia, menolak sebagai idiologi yang bertentangan dengan islam, membangun keastuan mujahidin yang kuat baik di dalam maupun di luar negeri, membentuk kepemimpinan imam (khilafah) di Indonesia dan di dunia, dan menegakkan dakwah dan jihad diseluruh dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lilalamin*.

4. Kelompok kepentingan Islam lainnya

Selain kelompok kelompok islam di atas ada beberapa kelompok kepentingan islam yang lainnya, yang merupakan pecahan atau bagian dari kelompok kepentingan islam yang lain. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam golongan ini dalam melakukan aksinya biasanya dalam bentuk aksi turun ke jalan untuk menyerukan apa yang menjadi keinginan mereka. Kelompok kepentingan itu antara lain misalnya KAMMI, Jamaah Tabligh, DDI, Hizbuttahir, Persis, FPI. selain dalam bentuk kelompok kepentingan yang

berdiri sendiri terdapat juga kelompok kepentingan islam yang tergabung dalam organisasi tertentu misalnya ICIS(*International Conference of Islamic Scholars*), ICIP (*International Center For Islam and Pluralism*), ICMI (ikatan cendekiawan Muslim Indonesia), Forum Ulama Indonesia (FUI), dan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu ada juga fenomena yang menarik dimana kelompok kepentingan di Indonesia khususnya pasca lengsernya Suharto, yaitu kelompok-kelompok tersebut berafiliasi pada satu partai politik tertentu, misalnya Muhammadiyah cenderung atau mendukung Partai Amanat Nasional (PAN), Nahdlatul Ulama cenderung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan beberapa individu dari kelompok kepentingan NU, Muhammadiyah, FPI, sempat menduduki jabatan strategis dalam struktur pemerintahan. Sebut saja misalnya Amien Rais yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merupakan partai aviliasi Muhammadiyah menjadi ketua MPR-RI, Abdurrahman wahid yang sempat menjadi Presiden Republik Indonesia dimana dia merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Terakhir yaitu pendiri FPI yaitu Habib Rizieq sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Kebijakan politik luar negeri Indonesia

Setiap entitas Negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya.

Sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta negara yang aktif telah ikut berkiprah dalam arena politik internasional. Politik luar negeri Indonesia yang pada awal abad 21 ini telah melewati usia lebih dari enam puluh tahun, gelombang pasang surut perjuangan para pionir Indonesia di bidang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan mereka di forum internasional untuk membela kepentingan nasional Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan undang-undang dasar 1945. Pasang surut politik luar negeri Indonesia yang dinamis ini seiring dengan perubahan dan perkembangan kehidupan politik dalam negeri Indonesia dan konstelasi politik internasional.

Kebijakan politik yang diorientasikan diluar batas territorial sebuah negara yang lazim disebut politik luar negeri suatu negara merupakan perpaduan antara kepentingan nasional, tujuan nasional, kedudukan atau konfigurasi geopolitik dan sejarah nasionalnya, dipengaruhi oleh faktor domestik (internal) dan faktor

internasional(eksternal). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan upaya untuk mempertemukan kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional dengan perkembangan dan perubahan lingkungan internasional.

Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri⁴⁴. Dengan berkiprah di kancah internasional, satu negara diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, lebih penting lagi politik luar negeri diarahkan pada upaya untuk mengkaitkan strategi dan kebijakan pembangunan nasional dengan langkah yang yang ditempuh di tingkat internasional. Oleh karena itu dalam menjalankan kebijakan politik luar diperlukan semacam dasar dan landasan kebijakan politik luar negeri, tidak terkecuali Indonesia.

I. Dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai landasan idiil Indonesia berisi

⁴⁴ Roeslan Abdulgani, dalam Bantarto Bandoro (ed) 2005. *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. CSIS. Yogyakarta.

pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.

Hal ini sesuai dengan yang terpetik dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea ke IV yang berbunyi :
“...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan...”. Pada masa Orde baru, landasan operasional kebijakan politik luar negeri Indonesia semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya: Ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973, Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri.

Dalam perkembangannya dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN. Di dalam GBHN di gariskan bahwa sasaran penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia adalah *“perwujudan politik luar negeri yang berdaulat,*

*bermartabat, bebas dan pro-aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global*⁴⁵.

Prinsip dari Politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”. Dan politik bebas aktif pun ditetapkan sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Sebagai sebuah landasan operasional, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif namun selalu merujuk pada apa yang menjadi kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bebas menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri pada salah satu kekuatan dunia. Dengan kata lain dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi amanat UUD 1945 dan rasa nasionalisme serta menolak ketertgantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia⁴⁶.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif juga diidentifikasi sebagai sikap politik yang tidak berpihak kepada salah satu kekuatan dunia, meskipun bukan bersikap netral. Politik luar negeri yang bebas aktif tersebut

⁴⁵ Athiqah Nur Alami. “landasan dan prinsip politik luara negeri Indonesia”, Ganewaty wuryandary(ed) .2008.*politik Luar Negeri Indonesiadi Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. Hal 26-27.

⁴⁶ Mohammad hatta, dalam Athiqah Nur Alami, ibid hal.43.

merupakan acuan atau petunjuk jalan untuk membentuk atau mengembangkan pengertian sikap dan tingkah laku seluruh warga Indonesia tentang politik luar negeri negaranya. Prinsip-prinsip ini selalu dilontarkan dan digunakan oleh para diplomat RI, pejabat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para analis, pada pada masa Sukarno maupun pada Suharto, terlebih lagi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono⁴⁷.

Pasca-Orde Baru terjadi perubahan pemerintahan secara cepat mulai dari B.J. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Setidaknya dua kabinet yang memerintah pasca-Orde Baru ini saling substansif dalam landasan luar negerinya. Pertama adalah Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasionalkan kebijakan politik luar negeri Indonesia melalui: Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no.37 tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU No.24 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, dan perubahan UUD 1945 pada beberapa pasal.

⁴⁷ Ikrar Nusa Bakti, *Peluang dan Kendala politik luar negeri Indonesia. Di akses pada tanggal 29 september 2010.*

Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kabinet ini meletakkan landasan operasional kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), yang isinya: pertama, pemantapan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan optimalisasi diplomasi Indonesia; kedua, peningkatan kerjasama internasional; ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia.

2. Tujuan dan sasaran kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Sebagaimana politik luar negeri pada umumnya, maka politik luar negeri Indonesia memiliki tujuan yakni mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu tugas pokok politik luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 1945, adalah "*...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...*". Berdasarkan keputusan presiden NO.7 tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah digaris bawahi bahwa untuk memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia dan meningkatkan kerja sama internasional.

Prioritas tersebut dipahami akan dapat meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan akan dapat juga membantu menciptakan dunia yang damai, serta untuk mewujudkan dan menjaga citra positif Indonesia dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia selanjutnya akan

mendorong penciptaan tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang baik.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada pendekatan strategis yang menekankan pada pendekatan lingkaran konsentris. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dan pengaruh lingkungan eksternal terhadap Indonesia. Lingkungan yang terdekat akan dapat menciptakan dampak yang relative besar pada setiap aspek situasi dalam negeri Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa situasi dalam dan luar negeri memiliki pengaruh dan keterkaitan pada pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia⁴⁸.

Untuk menerapkan kebijakan politik luar negeri dalam tingkatan regional pemerintah republik Indonesia mengelompokkan negara-negara yang berada di kawasan sekitarnya dalam bentuk lingkaran-lingkaran konsentrik yang terdiri dari tiga lingkaran. Masing-masing lingkaran dibuat berdasarkan pendekatan geopolitik dan geostrategik yang ditinjau dari kepentingan nasional Indonesia. Lingkaran-lingkaran dibuat untuk menunjukkan pengelompokan negara-negara yang menjadi perhatian utama Indonesia karena mempunyai kepentingan langsung dengan Indonesia secara timbal

⁴⁸ Posisi Indonesia Dalam Konfigurasi Kekuatan Global: Demokratisasi Dan Kebijakan Luar Negeri, 2005. Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

balik, baik dilihat dari segi kepentingan politik, ekonomi, keamanan, maupun kebudayaan.

Lingkaran konsektrik bukan untuk menetapkan skala prioritas atau untuk menentukan bahwa kawasan dalam lingkaran tertentu lebih penting dari pada lingkaran yang yang lain, tetapi lebih didasarkan pada pengelompokan wilayah ditinjau dari kedekatan pengaruh dan kepentingan politik, ekonomi, keamanan, maupun kebudayaan dengan Indonesia⁴⁹.

Pada lingkaran dalam (konsentrik pertama) Indonesia menempatkan konsentrasinya paada kawasan yang terletak di bagian utara yaitu negara-negara anggota ASEAN, karena ASEAN merupakan pilar utama politik luar negeri Indonesia dan dalam mengadakan hubungan luar negerinya. Hampir semua negara-negara anggota ASEAN mempunyai hubungan perbatasan darat atau laut dengan Indonesia. Sebagai Pilar utama kebijakan luar negeri terkonsentrasi pada perluasan, pengintegrasian, dan peningkatan struktur dan mekanisme ASEAN.

Pada lingkaran yang lebih luas (konsentrik kedua dan lingkaran konsentrik ketiga) Indonesia menempatkan kawasan sebelah timur dan tenggara yang disebut sebagai kawasan pasifik selatan dan negara Asia Timur. Untuk

⁴⁹ Abdul Irsan. 2005. *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Wilyah Asia Pasifik*. hal 32.

kawasan Asia Timur tujuan kebijakan luar negeri Indonesia adalah untuk membangun, mengembangkan, dan memperkuat dialog kerjasama dengan negara dikawasan tersebut.

Kawasan pasifik selatan mempunyai nilai penting bagi Indonesia karena dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan masalah kesatuan wilayah Indonesia bagian timur. Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan pasifik ini, selain memanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan menciptakan kawasan yang aman, damai dan stabil, juga dalam rangka mengamankan wilayah Indonesia dari gangguan kelompok separatis yang memperoleh dukungan dari negara-negara di kawasan pasifik tersebut.

3. Faktor yang mempengaruhi turut perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia⁵⁰.

a. Posisi geografis

Kepulauan Indonesia yang mempunyai letak geografis yang strategis karena berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta antara Benua Australia dan Asia Kontinental. Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang wilayahnya termasuk dalam wilayah perairan dan jalur perdagangan internasional. Sehingga memiliki peranan dalam perdagangan internasional terutama yang melalui jalur laut.

⁵⁰ Michael Leifer .1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Gramedia . Jakarta.

b. Sejarah perjuangan kemerdekaan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah berabad-abad yang mengalami penjajahan dan penindasan kolonial merupakan salah satu faktor yang menentukan arah dan karakter politik luar negeri Indonesia.

c. Penduduk

Indonesia dengan penduduk yang saat ini hampir mencapai 2 juta jiwa dengan penduduk mayoritas merupakan pemeluk agama islam juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri Indonesia.

d. Kekayaan alam

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia beragam dan merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.

e. Militer

Angkatan bersenjata merupakan bagian penting dari konsep ketahanan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara karena dengan memiliki kekuatan militer (ABRI) Indonesia dapat menangkal ancaman dari luar negeri.

f. Situasi internasional

Adanya kesenjangan antara antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial,

militer serta teknologi mendorong negara-negara yang sedang berkembang untuk mengadakan berbagai kerja sama regional.

Munculnya multipolarisme dalam bidang ekonomi dan politik, supremasi Amerika Serikat dan Rusia dalam bidang militer, dan tampilnya China dan India sebagai kekuatan Politik dan Ekonomi baru turut mempengaruhi proses kebijakan politik luar negeri Indonesia.

b. Sejarah perjuangan kemerdekaan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah berabad-abad yang mengalami penjajahan dan penindasan kolonial merupakan salah satu faktor yang menentukan arah dan karakter politik luar negeri Indonesia.

c. Penduduk

Indonesia dengan penduduk yang saat ini hampir mencapai 2 juta jiwa dengan penduduk mayoritas merupakan pemeluk agama Islam juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri Indonesia.

d. Kekayaan alam

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia beragam dan merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.

e. Militer

Angkatan bersenjata merupakan bagian penting dari konsep ketahanan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara karena dengan memiliki kekuatan militer (ABRI) Indonesia dapat menangkal ancaman dari luar negeri.

f. Situasi internasional

Adanya kesenjangan antara antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial,



UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bab IV

PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

A. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri merupakan telaah formulasi sikap dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Perumusan sikap dan tindakan dipengaruhi oleh sikap internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) dari sekelompok masyarakat yang terorganisir untuk mengupayakan dan memiliki ciri geografis hukum sosialnya sebagai negara-bangsa, atau kajian mengenai mengenai pola sikap suatu negara dalam mencapai tujuan nasional dengan memperhatikan situasi di sekelilingnya, baik strategik, historik, politik, maupun geografik⁵¹.

Politik luar negeri Indonesia merupakan keputusan-keputusan dan bagian dari tindakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi tuntutan tercapainya tujuan nasional dan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain. Oleh karena sebagai sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di

⁵¹ T May Rudy, 1992, *teori, Etika Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa. Bandung. Hal 16.

dunia sudah waktunya kebijakan politik luar negeri Indonesia di proyeksikan ke dalam sebuah mekanisme global, sebagai bagian dari tindakan aktif ikut serta menciptakan perdamaian dunia.

Kebijakan luar negeri Indonesia terkait sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dapat dilihat dari kebijakannya mengenai perdamaian atas konflik yang terjadi di Kawasan Timur-Tengah khususnya konflik antara Israel-Palestina. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik antara masyarakat muslim (Palestina) dengan Masyarakat Yahudi (Israel) mengenai adanya benturan kepentingan antara Muslim dan yahudi. Masyarakat muslim dalam hal ini Palestina mendapat perlakuan yang tidak adil dari Israel dalam bidang sosial sampai pada bidang politik. Latar belakang yang mendorong konflik Israel-Palestina di mulai dari tahun 1947, ketika Palestina memisahkan diri dari Israel untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat

Proses perdamaian Israel-Palestina yang berlarut-larut dan belum mampu mencapai kesepakatan untuk mengakhiri peperangan yang sangat panjang antara Israel dan Palestina banyak menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat sipil khususnya masyarakat Muslim Palestina. Akibatnya adalah munculnya aksi atau tindakan berupa pernyataan sikap atas penindasan yang terjadi di Timur Tengah yang dipelopori oleh kelompok-kelompok berbasis kepentingan Islam dalam jumlah massiv. Dalam proses penyampaian tuntutan atau kepentingan bisa melalui jalur formal seperti forum-forum dialog, atau dengan cara-cara diplomasi

melalui negosiasi. Tetapi pada umumnya melalui jalur non-formal seperti dengan aksi frontal dalam bentuk demonstrasi baik secara individu yaitu melalui aksi pernyataan sikap ataupun dengan mengerahkan massa. Aksi-aksi kelompok berbasis kepentingan Islam terjadi di banyak negara sebagai wujud rasa solidaritas atas tragedi yang menimpa umat muslim di Palestina banyak terjadi di negara lain baik negara non-muslim maupun negara muslim atau mayoritas muslim termasuk di Indonesia.

Ada dua elemen penting yang menjadi power kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia. Elemen penting pertama yang terdapat dalam kelompok-kelompok kepentingan Islam di Indonesia adalah massa. Massa memiliki pengaruh dan peranan yang besar dalam pergerakan kelompok kepentingan. Kekuatan massa dalam proses upaya pencapaian kepentingan-kepentingan sangat efektif dan memberikan dampak yang cukup besar dalam proses pencapaian kepentingan. Meskipun pencapaian kepentingan kelompok yang melibatkan atau mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat besar bisa mengarah pada tindak kekerasan. Akan tetapi hal yang penting untuk dipahami bahwa dengan kekuatan massa inilah kelompok-kelompok kepentingan bermain dan memberikan kontribusi terhadap pengambilan kebijakan luar negeri di Indonesia.

Elemen penting yang kedua adalah perspektif atau ideology yang dibawa, kelompok-kelompok kepentingan dalam proses interaksi dalam hal ini ideologi

islam. Dalam melakukan interaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penentu kebijakan yaitu kebijakan politik luar negeri, tak jarang ideologi dan emosional menjadi faktor penentu dalam sebuah kebijakan terlebih apabila ideology tersebut terlembagakan melalui partai yang berafiliasi dengan kelompok kepentingan. Sehingga pada tingkatan parlemen atau birokrat artikulasi kepentingan yang diusung, bisa di jadikan dalam bentuk kebijakan.

Kelompok kepentingan di Indonesia memang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia terkait perdamaian Israel-Paletina. Berbagai cara dilakukan oleh kelompok kepentingan dalam mendesak Pemerintah Indonesia dalam mengambil tindakan yang konkrit dalam proses perdamaian Israel-palestina. Mulai dari aksi diplomatis seperti melobi dengan pemerintah sampai dengan aksi-aksi jalanan menyerukan pemerintah indonesia mengambil dalam peran dalam proses perdamaian antara Israel-Palestina.

Kesamaan Ideologi yang dianut oleh kelompok kepentingan di Indonesia dengan Negara Palestina menjadi salah satu spirit bagi kelompok kepentingan tersebut untuk selalu berusaha mengambil peranan secara maksimal dalam proses perdamaian tersebut. Bahkan cara ekstrim yang diambil oleh kepentingan di Indonesia ketika aspirasi mereka tidak diterima oleh pemerintah indonesia adalah mereka mengambil jalan sendiri untuk ikut dalam peperangan di Israel-Palestina,

namun hal tersebut adalah langkah terakhir ketika langkah-langkah diplomatis tidak dapat tercapai.

Sebagai bagian dari sistem politik Indonesia, kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia mempunyai artikulasi kepentingan dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau kepentingan Islam yang ada di Indonesia pada khususnya dan kepentingan kelompok Islam yang ada di dunia pada umumnya. Ini merupakan semacam "kewajiban" dalam rangka perwujudan agama Islam sebagai *Rahmatan lilalamin*. Oleh karena itu kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia sangat peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan Islam khususnya yang berkaitan dengan Masalah di Kawasan Timur Tengah.

Kebijakan politik, luar negeri Indonesia terkait dengan terciptanya keamanan di kawasan Timur tengah merupakan hal yang harus wajib dilakukan. Selain karena merupakan amanah Undang-Undang seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Dimana Undang-undang mengamanahkan agar ikut serta dalam usaha terciptanya perdamaian dunia, juga secara tidak langsung merupakan wujud keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Sehingga kelompok Islam yang ada di Indonesia bereaksi atas apa yang menimpa saudara mereka yang ada di Palestina. Reaksi dari kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia adalah berusaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan Politik yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sehubungan

dengan tindakan yang diambil oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina mulai dari pemblokadean Jalur Gaza sampai pada penyerangan terhadap kapal yang membawa bantuan kemanusiaan, yaitu Freedom Frotilla.

Terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia baik berupa pernyataan sikap ataupun aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan beberapa kelompok kepentingan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), KAMMI, MMI, dan Hizbuttahrir. Menurut mereka menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional terkait kasus penyerangan tentara Israel ke kapal Freedom Fortilla. Gabungan kelompok kepentingan Islam ini menganggap tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang cukup berat. Kelompok-kelompok islam ini juga menekan agar pemerintah Indonesia bisa membawa masalah ini tidak hnaya melalui forum internasional setingkat Mahkamah internasional tetapi juga di forum-forum organisasi internasioan yang lain seperti APEC dan terutama lewat forum seperti OKI.

Selain aksi demonstrasi kelompok kepentingan Islam juga berusaha memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia agar melakukan tindakan yang konkret atas insiden tersebut. Hal ini dapat dilihat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh salah satu kelompok kepentingan Islam melalui H. Hasyim Muzadi dengan mengatasnamakan PBNU seperti berikut :

1. Mengutuk tindakan penyerangan tentara Israel ke wilayah Gaza, Palestina, karena hal itu adalah sebuah tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, menghancurkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa lain, menginjak-injak perikemanusiaan dan tidak menghormati hubungan baik sesama bangsa. Serangan itu betul-betul telah memberikan bukti nyata bahwa Israel telah melakukan kekejaman yang mengakibatkan korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap konvensi Genewa dan masyarakat dunia harus menganggap serangan Israel itu sebagai tindakan kejahatan perang.
2. Mendesak negara-negara anggota PBB untuk melakukan langkah-langkah guna menghentikan serangan Israel terhadap Palestina, dan mendesak PBB untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Israel, termasuk mengajukan para pemimpin Israel ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di dunia ini. NU sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi penghentian serangan Israel terhadap Gaza, karena adanya penolakan oleh satu negara.
3. Menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat dan negara sekutunya agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dunia bahwa apa yang telah dilakukan Israel adalah bukti

nyata tidak ada kemauan Israel untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah dan sebaliknya, dengan tanpa malu melakukan peninstaan terhadap prinsip-prinsip hubungan antarbangsa yang menjunjung tinggi dan menghormati hak bangsa lain untuk hidup merdeka dan berdaulat.

4. Mendesak PBB dan negara-negara besar untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang adil dan langgeng. Upaya-upaya yang dilakukan itu tentunya tidak hanya *'lip service'* sebagaimana kesan selama ini, melainkan upaya yang sungguh-sungguh demi terwujudnya perdamaian yang hakiki. Dalam konteks ini, peran obyektif Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pendukung setia Israel, sangat diharapkan, karena hal ini akan menentukan terwujudnya perdamaian yang dimaksud.
5. Menyerukan kepada seluruh faksi politik dan kelompok masyarakat Palestina, khususnya para pemimpin Hamas dan Fatah, para alim ulama dan cerdik pandai untuk secara sungguh-sungguh merapatkan barisan, menyatukan pandangan dan bersikap lebih realistis serta bersatu memperjuangkan Palestina yang merdeka dan berdaulat.
6. Mendorong pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan bahkan untuk mengirim tentara perdamaian di bawah bendera PBB serta melakukan inisiasi dan langkah-langkah diplomasi dalam rangka penghentian serangan dan pemberian sanksi.

7. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga NU, untuk menggalang solidaritas membantu rakyat Palestina, melalui penggalangan dana, relawan kemanusiaan, pengiriman obat-obatan dan pakaian, 'istighosah, qunut nazilah, zikir dan doa bersama untuk keselamatan para pejuang Palestina dan untuk para korban kaum muslimin Palestina yang gugur sebagai syuhada.
8. PBNU melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS) bekerja sama dengan jaringan civil society di dunia yang peduli dengan perdamaian di Timur Tengah akan berusaha menggalang solidaritas dan menyamakan pandangan serta mengambil langkah untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif di Timur Tengah bagi terselenggaranya perundingan damai antara Palestina dan Israel serta mengambil langkah-langkah untuk menggalang bantuan moral maupun materi bagi korban serangan brutal Israel terhadap Palestina.
9. PBNU menginstruksikan kepada Pengurus Cabang Istimewa NU di Timur Tengah dan Afrika, seperti, Arab Saudi, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Mesir, Tunisia dan Maroko agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan untuk membantu korban rakyat Palestina akibat serangan Israel⁵².

Selain tindakan aksi demonstrasi dan dalam bentuk pernyataan sikap kelompok kepentingan Islam juga melakukan penekanan atau tuntutan kepada dengan cara melakukan lobi. Misalnya NU, Muhammadiyah, beserta beberapa ulama bersama-sama bertemu yang tergabung dalam Forum Ulama Indonesia, dengan Presiden Susilo Bambang Yudhono agar segera mengambil langkah yang lebih nyata dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina⁵³. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk aktif dan terus berusaha mengupayakan perdamaian Israel-Palestina dengan cara membawa masalah tersebut dalam arena atau forum internasional.

Selain melalui jalur birokrasi kelompok kepentingan islam juga terkadang terjun langsung dengan mengusung nama organisasi kelompok mereka dalam forum internasional dalam bentuk penyelenggaraan seminar ataupun dengan cara dialog lintas agama dengan tema toleransi agama. Ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat internasional dapat melihat Islam sebagai agam yang tolerir

⁵²Lihat dalam "Pernyataan Sikap PBNU atas serangan Israel Terhadap Palestina". <http://www.lakpesdam.or.id/warta/299/pernyataan-dan-sikap-pbnu-atas-serangan-israel-terhadap-palestina>. di akses pada 29 oktober 2010.

⁵³ Lihat dalam "RI Dukung Perjuangan Palestina" di akses melalui. <http://bataviase.co.id/node/142762>. pada tanggal 29 oktober 2010

terhadap agama lain, sehingga kasus Israel-Palestina juga dapat diselesaikan dengan cara dan jalur yang damai.

Kelompok kepentingan dan pengambilan kebijakan dalam politik luar negeri Indonesia pada akhirnya akan dilihat sebagai sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan konsekuensi iklim demokratis berpengaruh terhadap hal tersebut. Karena dalam demokrasi sendiri terdapat “ruang-ruang” untuk melakukan lobbying dan adanya ketersediaan jalur-jalur pemenuhan kepentingan leluasa bermain, kepentingan-kepentingan inilah yang kemudian melahirkan point pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Integrasi kelompok kepentingan dan pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah cerminan keterkaitan dan hubungan yang terbangun antara kelompok kepentingan dan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintahan yang berkuasa.

B. Peranan Kelompok Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Berbicara mengenai peranan maka hal tersebut harus dilihat secara menyeluruh mulai dari faktor sejarah keterkaitan kelompok kepentingan tersebut, kronologis pengambilan kebijakan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan yang diambil. Hal yang perlu diingat bahwa

pengambilan kebijakan suatu negara harus selalu bersumber dari kepentingan nasional dan kepentingan politik yang melatar belakangnya sehingga keputusan politik luar negeri tetap menjadi tugas utama pemerintah namun disisi lain pemerintah juga bisa mengakomodasi kedua hal tersebut.

Kelompok kepentingan di Indonesia semisal PBNU dan Muhammadiyah adalah salah satu contoh dari sekian banyak kelompok-kelompok kepentingan di Indonesia yang berbasis ideology islam dan memiliki massa relative banyak, mempunyai peran dalam politik indonesia secara umum dan pengambilan kebijakan politik luar negeri secara khusus. Hal inilah yang menjadi point penting atau modal dasar bagi kelompok kepentingan tersebut dalam pencapaian tujuan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Interaksi yang terbangun pada akhirnya adalah interaksi yang dialogis dan berkesinambungan.

Masalah kontlik timur tengah dan kepentingan kelompok berbasis islam di Indonesia menjadi perhatian sejak isu melawan terorisme dijadikan isu global oleh Amerika dan menjadi masalah serius masyarakat internasional khususnya masyarakat muslim dunia. Masyarakat internasional khususnya negara-negara muslim menganggap pemicu tindakan terorisme yang dilakukan yang oleh kelompok radikal islam merupakan akibat dari unsur ketidakadilan dalam penanganan masalah Israel-Palestina oleh negara-negara non-muslim (AS). Sedangkan pada level negara, hal yang sama juga dirasakan oleh kelompok-

kelompok kepentingan Islam khususnya kelompok-kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia.

Kelompok-kelompok kepentingan di Indonesia melihat hal tersebut sebagai konflik yang menjatuhkan martabat ideology sehingga perlu melakukan sesuatu sebagai bentuk langkah real dalam penyelesaian masalah tersebut, hal tersebut diterjemahkan melalui propaganda dan injeksi nilai melalui loby dan pertemuan dengan pemerintah guna membahas hal tersebut. Pertemuan demi pertemuan yang diadakan menjadi langkah awal dan merupakan bukti keterkaitan antara pemerintah dan kelompok kepentingan tersebut.

Kesamaan ideology antara Palestina dan kelompok kepentingan di Indonesia menjadi hal dasar bagi kelompok kepentingan untuk berusaha mengambil peranan yang signifikan dalam mencapai kesepakatan perdamaian antara Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina yang telah menjatuhkan martabat ideology menjadi dorongan utama munculnya kelompok-kelompok kepentingan Islam tersebut untuk ikut terlibat dalam proses perdamaian dalam masalah Israel-Palestina dan menciptakan proses stabilisasi di Timur Tengah khususnya stabilitas antara Palestina dan Israel.

Rentetan kejadian yang telah berlangsung lama itu dijadikan bahan evaluasi mengenai dimana titik kelemahan dan peluang perdamaian konflik Israel-Palestina sehingga dengan demikian kelompok kepentingan bisa membaca situasi dan

menentukan sikap di wilayah mana mereka akan berjuang, sebagai contoh nyata aksi nyata kelompok kepentingan di Indonesia adalah dengan aksi penggalangan dana dan dukungan internasional melalui propaganda media, hal ini berdampak pada meluasnya informasi dan dukungan di tingkatan masyarakat umum Indonesia. Selain tercapainya kepentingan yang mereka usung, faktor penting yang juga harus diperhatikan oleh kelompok kepentingan adalah bagaimana kepentingan itu bisa masuk ke ranah umum dan memastikan tujuan kepentingan kelompok tersebut adalah masalah bersama bukan hanya persoalan individu atau negara dalam hal ini kepentingan kelompok Islam merupakan kepentingan kemanusiaan. Dalam pandangan kelompok kepentingan Islam semua makhluk dalam hal ini manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga apa yang menimpa masyarakat Palestina bisa menimpa masyarakat lain terlepas dari apakah dia Islam atau bukan.

Upaya-upaya Kelompok kepentingan Islam yang ada di Indonesia dalam proses pengimplementasian kebijakan politik luar negeri Indonesia khususnya kebijakan mengenai masalah Israel dan Palestina dapat dilihat dari kronologis dan langkah yang kelompok kepentingan tersebut ambil. Implementasi merupakan hal lanjutan ketika pada tingkatan dasar atau perundingan awal telah didapatkan point utama dalam pencapaian tujuan kelompok kepentingan, dengan kata lain pembahasan mengenai akar masalah dari konflik Israel-Palestina, pelaku-pelaku yang terkait dan kendala-kendala yang menghambat proses perdamaian tersebut

haruslah dipahami dan ditelaah secara menyeluruh sehingga tidak lagi memunculkan kebingungan dan kegamangan dalam bertindak terkait dengan kebijakan luar negeri pada kasus Israel-Palestina.

Berangkat dari hal tersebut, analisis mengenai peranan kelompok kepentingan bisa dilihat dan dipahami secara jelas, langkah-langkah dan alur kepentingan yang masuk kepada pemerintah yang berkuasa disimpulkan sebagai peranan yang signifikan. Sebagai contoh konkret hal tersebut, PBNU dan Muhammadiyah yang menjadi kelompok kepentingan Islam dalam mengusung kepentingan Islam dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia pada kasus Israel-Palestina dipandang telah melakukan aksi-aksi nyata melalui tekanan dan lobi kepada pemerintah, kampanye mereka berupa pernyataan sikap dan propaganda di media massa dimaknai sebagai langkah awal untuk kemudian masuk ke birokrat pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah. Hal tersebut berwujud dengan dialog antara pemimpin PBNU dan Muhammadiyah dengan para pengambil kebijakan Indonesia.

Pemerintah selaku pengambil kebijakannya hendaknya pula keinginan kelompok kepentingan Islam sebagai dorongan dari pihak yang ingin melihat dan menuntut peranan besar pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara. Sehingga perannya sebagai sebuah negara lebih jelas dan terarah, hal tersebut dilandasi dengan tujuan dan tekad pemerintah untuk mengambil peran dalam setiap masalah di dunia sebagai wujud nyata dari penerapan amanah UUD. Dorongan-

dorongan yang diberikan kelompok kepentingan Islam tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan atau mungkin saja menjadi point utama perjuangan pemerintah Indonesia terhadap masalah konflik Israel- Palestina.

Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat dan dengan ideologi demokrasi yang dianutnya menjadikan ruang-ruang interaksi antara kelompok kepentingan dan pemerintah bisa terjadi, kemampuan untuk mengakomodasi kepentingan atau bahkan tekanan akan dititik beratkan pada sikap pemerintah dalam implentasi kebijakan dalam hal ini kebijakan luar negeri. Menyatakan sikap sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, indonesia mampu melakukan gerak yang signifikan dan menjadi contoh bagi negara lainnya untuk melakukan aksi yang sama bahkan lebih dalam proses penyelesaian masalah timur tengah.

Pernyataan sikap jelas pernah dilontarkan PBNU melalui pemimpinnya bahwa mereka melihat konflik Israel – Palestina adalah bentuk penjajahan baru bisa dilihat sebagai wujud nyata keberpihakan dan aksi mereka menentang penjajahan di timur tengah utamanya konflik Israel-Palestina.

Melihat hal tersebut, maka dapat dilihat peranan yang diambil oleh kelompok kepentingan Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia mengenai konflik Israel- Palestina adalah menjadi pendorong aktif dalam pemerintah dan penyusunan kebijakan luar negeri, kampanye-kampanye mereka untuk menuntut peranan dan keberpihakan Indonesia adalah modal dasar dan pendorong yang

kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang baik dan memperjuangkan kepentingan internasional.

Peranan kelompok kepentingan sebagai pendorong aktif juga dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan mereka dalam tingkatan organisasional, keikutsertaan mereka dalam perjuangan berupa mengirim bantuan dan tenaga manusia untuk dimanfaatkan dapat dimaknai sebagai upaya memberikan contoh bagi pemerintah dalam bersikap, meskipun kita tahu bagaimana alur birokrasi pemerintah yang terkadang rumit akan tetapi tetap diharapkan partisipasi pemerintah tetap ada dan berkesinambungan.

Pengaruh kelompok kepentingan melalui element-element yang mereka miliki semisal ideologi, massa, sikap dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil melahirkan dampak berupa peranan yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan dalam hal ini kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah konflik Israel-Palestina yang dilihat sebagai masalah serius semua negara dan masalah memperjuangkan martabat agama Islam di dunia, melawan penindasan yang terjadi merupakan kewajiban bagi mereka yang beragama Islam.

Peranan kelompok kepentingan sebagai pendorong aktif berupa inisiator kebijakan adalah wujud nyata kepedulian dan implementasi dari kepentingan-kepentingan yang mereka usung ke ranah pemerintah, keinginan mereka untuk turut ambil bagian dari setiap masalah perlu dilihat dan dimaknai sebagai langkah

maju dalam hubungan antar manusia dan juga lebih jauh sebagai hubungan yang terbangun antar negara melalui kelompok kepentingan ini.

Inisiator kebijakan adalah peranan yang cukup signifikan dalam pemerintah, mengambil perhatian masyarakat kemudian membawanya ke ranah politik untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah yang sedang berkuasa. Posisi dalam perundingan atau kesepakatan-kesepakatan yang hendak dicapai menggambarkan eksistensi kelompok kepentingan dalam politik luar negeri Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bab V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.

1. Kelompok kepentingan dalam hal ini kelompok kepentingan Islam memiliki pengaruh dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kelompok kepentingan Islam merupakan faktor penting dalam proses penyusunan kebijakan politik luar negeri Indonesia, karena mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri. Pengaruh ini tidak menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia tapi kelompok kepentingan Islam ini berperan secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan Politik Luar Negeri Indonesia.
2. Peranan kelompok kepentingan islam Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia sebagai pendorong aktif berupa inisiator kebijakan dalam proses kebijakan politik luar negeri indonesia.

B. Saran-saran

1. Politik luar negeri tidak dapat dijalankan berdasarkan keinginan para elit pembuat keputusan dalam hal ini pemerintah dan pelaksana kebijakan. Di samping pentingnya memperhitungkan konteks strategis di lingkungan internasional yang telah banyak mengalami perubahan yaitu sejak

dirumuskannya politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga harus memperhitungkan keadaan dan perubahan-perubahan dalam konteks domestik.

2. Semakin pentingnya opini publik dalam proses perumusan kebijakan, termasuk di bidang politik luar negeri. Pada saat sekarang ini pemerintah tidak dapat lagi mengabaikan pendapat dan aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan politik luar negeri. Politik luar negeri tidak dapat lagi dianggap sebagai ranah eksklusif para elit pembuat kebijakan. Sebagai sebuah negara demokrasi, politik luar negeri Indonesia harus mencerminkan aspirasi publik secara luas.
3. Berkaitan dengan peran Islam dalam politik dalam negeri, yang mana makin terbukanya partisipasi politik masyarakat, faktor Islam menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan lagi oleh pemerintah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dan berstatus sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kedudukan kelompok kepentingan Islam sebagai wahana pengartikulasian sentimen publik menjadi faktor penting bagi kebijakan politik luar negeri.
4. Keterlibatan dan keikutsertaan organisasi-organisasi massa berbasis Islam, baik dalam proses kebijakan politik luar negeri maupun dalam mendukung pelaksanaan diplomasi senantiasa dibutuhkan dan perlu untuk memperkuat

dukungan di dalam negeri dan adanya konsensus nasional terhadap agenda-agenda Indonesia di panggung internasional.

Bab IV

PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

A. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri merupakan telaah formulasi sikap dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Perumusan sikap dan tindakan dipengaruhi oleh sikap internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) dari sekelompok masyarakat yang terorganisir untuk mengupayakan dan memiliki ciri geografis hukum sosialnya sebagai negara-bangsa, atau kajian mengenai mengenai pola sikap suatu negara dalam mencapai tujuan nasional dengan memperhatikan situasi di sekelilingnya, baik strategik, historik, politik, maupun geografik⁵¹.

Politik luar negeri Indonesia merupakan keputusan-keputusan dan bagian dari tindakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi tuntutan tercapainya tujuan nasional dan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain. Oleh karena sebagai sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di

⁵¹ T May Rudy, 1992, *teori, Etika Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa. Bandung. Hal 16.

Bab IV

PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

A. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri merupakan telaah formulasi sikap dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Perumusan sikap dan tindakan dipengaruhi oleh sikap internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) dari sekelompok masyarakat yang terorganisir untuk mengupayakan dan memiliki ciri geografis hukum sosialnya sebagai negara-bangsa, atau kajian mengenai mengenai pola sikap suatu negara dalam mencapai tujuan nasional dengan memperhatikan situasi di sekelilingnya, baik strategik, historik, politik, maupun geografik⁵¹.

Politik luar negeri Indonesia merupakan keputusan-keputusan dan bagian dari tindakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi tuntutan tercapainya tujuan nasional dan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain. Oleh karena sebagai sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di

⁵¹ T May Rudy, 1992, *teori, Etika Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa. Bandung. Hal 16.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, A Banyu Perwita dan Yanyan Mohammad Yani.2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. RosdaKarya. Bandung.
- Bantarto Bandoro (ed) 2005. *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*.CSIS. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Coplin. D. Willian dan Marseden Marbun. 2005. *Pengantar Politik Internasional Suatu telaah Teoritis*, Sinar Baru. Bandung.
- Djafa, Zainuddin. 2006. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Fealy, GreG dan Greg Barton, 1997. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*.LKS. Yogyakarta.
- Leifer, Michael .1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Gramedia . Jakarta
- Frankel, J. 1990. *Hubungan Internasional* .ANS Sungguh Bersaudara. Jakarta
- Hamid , Zulkifli. 1999. *Sistem Politik Australia*. P2P LIPI. Jakarta.
- Irsan , Abdul. 2005. *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Wilayah Asia Pasifik*. P2P LIPI. Jakarta.
- Maarif, Syafii. 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia*. Mizan. Bandung.
- Prawira S, Sumpena. 1985. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Remadja Karya. Jakarta
- May Rudy, Teuku, 1993. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa. Bandung
- Wuryandary, Gnewaty (ed), *Politik Luar Negeri Indonesiadi Tengah Pusaran Politik Domestik*. Pustaka Pelajar. Jakarta

JURNAL

- Posisi Indonesia Dalam Konfigurasi Kekuatan Global: Demokratisasi Dan Kebijakan Luar Negeri, 2005. Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Haniah Hanafie. 1997. *ICMI Sebagai kelompok Kepentingan* . P2P LIPI. Jakarta

Majelis Diktilitbang dan LPI Muhammadiyah.syarifuddin (ed).2010. *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. Kompas. Jakarta.

Problematika Reformasi. Jurnal Politik. Vol. 5, No.1. 2008. P2P-LIPI. Widya Graha. Jakarta.

WEBSITE

“Pernyataan Sikap PBNU atas serangan Israel Terhadap Palestina”.
<http://www.lakpesdam.or.id/warta/299/pernyataan-dan-sikap-pbnu-atas-serangan-israel-terhadap-palestina>. di akses pada 29 oktober 2010.

<http://wavysearch.com/eboock/621-konflik-kepentingan-antara-amerika-dan-kelompok-islam-.html>. di akses pada tanggal 26 mei 2010

“RI Dukung Perjuangan Palestina” di akses melalui.
<http://bataviase.co.id/node/142762>. pada tanggal 29 oktober 2010